

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak rokok merupakan pungutan yang menjadi salah satu komponen sumber pendapatan negara di dunia. Berbagai kebijakan pajak rokok selain berfungsi sebagai sumber pendapatan suatu negara juga merupakan alat kebijakan untuk mengurangi tingkat konsumsi rokok. Hasil tembakau merupakan potensi utama dalam meningkatkan pendapatan pemerintah melalui cukai tembakau dan pajak rokok (Zeynep Önder, 2016). Di negara China, pajak tembakau memiliki proporsi penting dalam pendapatan pemerintah. Hal tersebut terungkap dari studi penelitian yang dilakukan oleh Teh-wei Hu, (2016), mengatakan bahwa pemerintah pusat China memperbolehkan pemerintah daerah untuk menahan 20% dari pendapatan pajak tembakau. Konsumsi rokok di negara Grenada menentukan pendapatan pemerintah dalam penerimaan pajak rokok, di mana pada tahun 2015 pendapatan pemerintah dan penerimaan pajak rokok diestimasi mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 8,7% dan 11% (Foucade, 2019).

Potensi peningkatan pajak rokok di Uni Eropa sangat dimanfaatkan oleh masing-masing anggota negara Uni Eropa. Menurut Asen, (2021) mengatakan bahwa pungutan cukai rokok dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak rokok di sebagian besar anggota negara Uni Eropa jauh lebih tinggi dari pungutan yang diwajibkan secara hukum. Negara Irlandia memiliki cukai rokok tertinggi

sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan pajak rokok yaitu sebesar €8.42/\$9.60. Sedangkan negara Bulgaria merupakan negara anggota Uni Eropa yang memiliki cukai terendah yaitu sebesar €1.81/\$2.06. Selain itu, pengenaan pajak dari harga jual eceran rata-rata tertimbang paling tinggi terdapat di negara Finlandia yaitu sebesar 89,8%. Sedangkan yang terendah terdapat di negara Swedia yaitu sebesar 73,3%.

Pajak rokok di Indonesia sangat vital perannya, mengingat pajak rokok merupakan salah satu bagian dalam pengumpulan pendapatan negara. Namun, persoalannya adalah kenaikan tarif cukai yang merupakan dasar perhitungan pajak rokok tidak diikuti oleh harga rokok yang masih terjangkau. Harga rokok yang relatif murah pada tahun 2019 disebabkan oleh tidak adanya kenaikan tarif cukai (IAKMI, 2020). Berdasarkan laporan IAKMI tahun 2020 diketahui bahwa tarif cukai maksimal dari harga jual eceran (HJE) di Indonesia yaitu sebesar 57%. Jika hal tersebut dibandingkan dengan tarif cukai dari HJE di negara Eropa yang rata-rata sebesar 80,4%, maka tarif cukai atas dasar HJE di Indonesia masih terbilang cukup rendah, di mana selisihnya terhadap tarif cukai atas HJE di Uni Eropa yaitu sebesar 23,4%.

Kebijakan pajak rokok di Indonesia tertuang dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan tarif cukai berlandaskan pada UU 39/2007 tentang Cukai dan PMK 152/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Khusus tahun 2020, terdapat penyesuaian tarif cukai di mana tarifnya dinaikkan sebesar 23% (IAKMI, 2020).

Penerimaan pajak rokok di Indonesia dalam rentang lima tahun terakhir dari tahun 2015-2020 berfluktuasi. Penurunan penerimaan pajak rokok terjadi di tahun 2016, di mana penerimaan pajak rokok turun sebesar 10% dari penerimaan pajak rokok tahun 2015. Penerimaan pajak rokok di Indonesia mengalami penurunan sebesar 1,4% di tahun 2016. Sedangkan peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2015, 2017, dan 2020 yang masing-masing memiliki tingkat kenaikan sebesar 24,1%, 7,3%, serta 9,5%. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak rokok masih belum optimal.

Penurunan penerimaan pajak juga terjadi di Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi penyumbang pajak rokok terbesar bagi negara. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2018-2019. Pada tahun 2018 pendapatan pajak rokok Provinsi Jawa Timur berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) hanya terealisasi Rp 2.170.048.515.706 dari yang ditargetkan sebesar Rp 2.200.000.000.000. Pada tahun 2019 diketahui bahwa realisasi pajak rokok turun drastis di mana hanya terealisasi sebesar Rp 1.999.207.318.173 dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 2.377.800.000.000. Penurunan tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh inflasi, harga rokok, kemiskinan, upah minimum, kesejahteraan masyarakat, konsumsi rokok, dan pengangguran.

Inflasi dapat diidentifikasi sebagai kenaikan harga pada barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Laju inflasi berperan penting terhadap penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan realisasi pajak rokok dari tahun 2019-2020 sebesar Rp 704.208.009.150 diikuti oleh peningkatan tingkat inflasi pada

kategori makanan, minuman, dan rokok yaitu 0,84% pada tahun 2019 dan naik menjadi 2,26%. Hal tersebut menunjukkan bahwa naiknya inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019-2020. Inflasi dan pajak bergerak dalam arah yang sama tetapi dengan besaran yang berbeda (Patoli, 2012).

Harga rokok juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Harga rokok dapat dilihat dalam indeks harga konsumen pada kategori makanan, minuman, dan rokok. Kenaikan penerimaan pajak rokok di Jawa Timur dari tahun 2016-2017 diikuti oleh kenaikan IHK pada kategori makanan, minuman, rokok, dan tembakau yang masing-masing sebesar 127,33 pada 2016 dan 135,78 pada tahun 2017. Tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok berpengaruh terhadap penerimaan cukai rokok (Nugrahini, 2019). Kenaikan rata-rata harga rokok dalam satu tahun sebesar 7,38% dapat meningkatkan pajak pendapatan pada 36 negara di Afrika sebesar 19,39% (Ho *et al*, 2017).

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terdapat di berbagai negara. Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi menyebabkan penerimaan pajak lebih rendah di negara-negara kurang berkembang (Gnangnon, 2021). Penurunan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018-2019 diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin dengan besaran masing-masing 4.332 juta jiwa dan 4.112 juta jiwa. Namun, ketika penerimaan pajak rokok Provinsi Jawa Timur naik di tahun 2020 dengan total penerimaan sebesar 2,7 Triliun juga diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk miskin yang membengkak menjadi 4.419 juta jiwa.

Upah minimum berkenaan dengan penghasilan terendah seorang individu. Upah minimum diduga sebagai salah satu faktor dalam peningkatan pajak rokok. Menurut Huang *et al*, (2021) mengatakan bahwa negara bagian dengan upah minimum yang relatif tinggi cenderung juga menerapkan pajak rokok yang tinggi. Fenomena di lapangan juga ditemukan bahwa kenaikan penerimaan rokok dari tahun 2019-2020 diikuti oleh kenaikan upah minimum Provinsi Jawa timur masing-masing sebesar 1,6 juta dan 1,7 juta. Fenomena tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Guntur, (2021) yang mengungkapkan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap penerimaan pajak PBB.

Kesejahteraan masyarakat dipandang sebagai ukuran dalam melihat kelayakan hidup masyarakat. Kerangka kerja fungsi kesejahteraan sosial untuk mendapatkan ukuran progresivitas pajak (Kakwani & Son, 2021). Fakta di lapangan menemukan bahwa kenaikan penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 juga diikuti oleh naiknya indeks pembangunan manusia yaitu sebesar 71,71.

Konsumsi rokok di Jawa Timur masih sangat masif dan merupakan suatu masalah dalam menekan laju konsumsi tersebut. Tingginya tingkat konsumsi rokok di Jawa Timur terlihat dari rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat berdasarkan komoditasnya, di mana rata-rata pengeluaran per kapita khusus rokok meningkat sebesar 1,4% dari tahun 2019-2020. Padahal, menurut penelitian Hirono & Smith, (2018) mengatakan bahwa pengurangan konsumsi rokok sebesar 3,0 dapat meningkatkan pendapatan untuk pengeluaran publik.

Selain konsumsi rokok, pengangguran juga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak rokok. Pengangguran di Provinsi Jawa Timur meningkat dari tahun 2019-2020 di mana persentase masing-masing sebesar 3,92% dan 5,84%. Naiknya tingkat pengangguran tersebut juga diiringi oleh naiknya penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengangguran memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Ali *et al.*, 2018). Menurut Silva, (2018) mengatakan bahwa pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan cukai.

Kontradiksi hasil penelitian terkait faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak banyak ditemukan dalam beberapa penelitian. Patoli, (2012) dan Hassan *et al.*, (2021) mengemukakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penelitian Ali *et al.*, (2018) mengatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hirono & Smith, (2018) dan Primorac & Vlah Jeric, (2017) mengatakan bahwa harga rokok berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak rokok. Sedangkan Wildan, (2018) mengatakan bahwa indeks harga konsumen tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Usman & Idoko, (2021) mengatakan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak. Sedangkan Alwi *et al.*, (2018) mengatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Martiyus, (2021) mengatakan bahwa rata-rata gaji per bulan berpengaruh negatif terhadap diversifikasi pendapatan pajak. Sedangkan Utomo *et al.*, (2018) mengatakan bahwa upah minimum kota berdampak positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kota

Semarang. Singoro, (2021) mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kenya. Sedangkan Martiyus, (2021) mengatakan bahwa Rasio Gini berpengaruh negatif terhadap diversifikasi pendapatan pajak di Indonesia. Primorac & Vlah Jeric, (2017) dan da Silva, (2019) mengatakan bahwa konsumsi rokok berpengaruh positif terhadap penerimaan cukai. Sedangkan Alwi *et al.*, (2021) mengatakan bahwa konsumsi yang tercermin dari pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Ali & Audi, (2018) mengatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan da Silva, (2019) mengatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap penerimaan cukai.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diidentifikasi bahwa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur terdiri dari inflasi, harga rokok, kemiskinan, upah minimum, kesejahteraan masyarakat, konsumsi rokok, dan pengangguran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan secara lugas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020?

2. Apakah harga rokok berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020?
3. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020?
4. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020?
5. Apakah kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020?
6. Apakah konsumsi rokok berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020?
7. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020?
8. Apakah secara simultan inflasi, harga rokok, kemiskinan, upah minimum, kesejahteraan masyarakat, konsumsi rokok, dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan tinjauan pokok permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Inflasi, harga rokok, kemiskinan, upah minimum, kesejahteraan masyarakat, konsumsi rokok, dan pengangguran yang diteliti yaitu di Jawa

timur yang mencakup 8 Kabupaten/Kota sebagai representasi dari wilayah Jawa Timur.

2. Inflasi yang diteliti adalah tingkat inflasi yang terjadi pada harga rokok kretek filter yang ada di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu dari tahun 2015-2020.
3. Pengangguran yang diteliti yaitu tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur dari tahun 2015-2020.
4. Kesejahteraan masyarakat yaitu mengaju pada indeks pembangunan manusi di Jawa Timur tahun 2015-2020.
5. Pajak rokok yang diteliti adalah penerimaan pajak rokok Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Uraian latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah menjadi latar belakang dicantumkan tujuan penelitian ini. Oleh karena itu tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagaimana berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh harga rokok terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020.

5. Menguji dan menganalisis pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh konsumsi rokok terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020.
7. Menguji dan menganalisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020.
8. Menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan inflasi, harga rokok, kemiskinan, upah minimum, kesejahteraan masyarakat, konsumsi rokok, dan pengangguran terhadap tingkat penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan output atau keluaran dari suatu penelitian. Oleh karena itu, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya di bidang akuntansi perpajakan. Selain itu, juga sebagai kontribusi hasil pengembangan pengetahuan dalam pendidikan nasional.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan peneilitin ini dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak rokok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat

serta dapat pula dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang bersifat sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian merupakan arah gambaran peta kegiatan penelitian yang berisi komponen-komponen rancangan penelitian yang berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami suatu penelitian. Oleh karena itu, sistematika penulisan ini dirancang sebagai berikut:

Bab I menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II penelitian ini, memuat beberapa penjelasan terkait kajian pustaka, kajian teori, kerangka pikir, dan perumusan hipotesis.

Bab III menjelaskan komponen metoda penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data penelitian yang memuat jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, dan rancangan analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan pembahasan.

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran penelitian.